

2015

LAPORAN RISET PARTISIPASI  
PEMILIH PADA PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

**PERILAKU MEMILIH (VOTING BEHAVIOUR) MASYARAKAT KOTA BINJAI  
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM**

**Tim Penyusun**

Oleh:

Lembaga Penelitian STAIS Ishlahiyah Kota Binjai

Drs. H. Laily Hasbullah, M.Pd

H. Muhammad Amin Nasution, MA

Muhammad Saleh, MA



**STAIS ISHLAHIYAH KOTA BINJAI  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
2015**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.<sup>2</sup>

Jika dipandang dari kacamata demokrasi, tujuan pemilu hendaklah kembali berpegang pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis yaitu menjamin kepentingan semua golongan masyarakat. Untuk itu, tujuan pemilu harus dinyatakan dalam fungsi-fungsi utama pemilu yaitu:<sup>3</sup>

1. Membentuk pemerintahan perwakilan lewat partai politik pemenang pemilu.
2. Menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat.
3. Pergantian atau pengukuran elit penguasa.
4. Pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991) hal. 2

<sup>2</sup> Muhammad Asfar, *Pemilu dan perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006) hal. 3

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hal, 37

Menurut Parulian donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representatif*).<sup>4</sup>

Dari sudut pandang manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relatif lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Dalam arti lebih sederhana, tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.

Sebuah pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin politik. Yang dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, maupun bupati. Setidaknya sudah 10 kali Indonesia melaksanakan pemilu dari tahun 1955–2009 untuk memilih pemimpin lembaga eksekutif atau presiden di tingkat pusat.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

---

<sup>4</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) hal. 5

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>5</sup>

Dalam sebuah pilihan politik, tidak akan terlepas dari aktor yang berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang (masyarakat/rakyat) untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih langsung, partisipasi secara langsung pula atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Untuk itu, partisipasi masyarakat/rakyat dalam setiap lapisannya memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu bangsa atau suatu wilayah tertentu. Hal ini berlaku dalam setiap pelaksanaan pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Rakyat merupakan subyek politik aktif yang menentukan berhasil tidaknya proses pemilu. Salah satunya yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:<sup>7</sup>

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah / pernah kawin; dan
3. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Pemilih pemula mempunyai peranan yang penting karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar,

---

<sup>5</sup> Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, “*Modul: Pemilu untuk Pemula*”, (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010) hal. 15

<sup>6</sup> Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010) hal. 53

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 47

sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemberian suara dalam pemilu oleh kebanyakan analisis digolongkan sebagai salah satu ukuran partisipasi politik. Makin tinggi tingkat pemberi suara dalam pemilu diasumsikan makin tinggi pula tingkat partisipasinya. Pemberian suara merupakan salah satu bentuk keterlibatan politik warga negara, yang oleh Milbrath digolongkan menjadi empat macam, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kegiatan Gladiator, meliputi memegang jabatan publik dan partai, menjadi calon pejabat, menghimpun dana politik, mengikuti *caucus* atau rapat strategi, menjadi anggota aktif suatu partai, dan menyisihkan waktu untuk kampanye.
2. Kegiatan transisi, meliputi mengikuti rapat atau pegawai politik, memberi dukungan dana partai atau calon, dan jumpa pejabat publik atau pemimpin politik.
3. Kegiatan menonton, meliputi memakai kancing atau mengenakan stiker pada mobil, mengajak orang memilih dengan cara tertentu, menyelenggarakan diskusi politik, memberikan suara, dan mengekspose diri kepada dorongan politik.
4. Bersikap masa bodoh.

Hampir sama dengan Milbrath, Bone dan Ranney menyebut adanya tujuh dimensi perilaku memilih, meliputi:<sup>9</sup> aktivis organisasi, penyumbang organisasi, pemuka pendapat (*opinion leader*), pemberi suara, tidak memberikan suara, dan *apolitis*.

Dalam sebuah negara demokrasi, adanya pemilu merupakan suatu klaim terhadap suatu sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemilu itu sendiri tidak lepas

---

<sup>8</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis....* hal. 35

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 35

dari adanya suatu golongan yang tidak berpartisipasi di dalamnya atau biasa disebut golongan putih (golput).

Akhir-akhir ini, di negara kita ramai dibicarakan tentang meningkatnya jumlah golput dari kalangan generasi muda. Kekhawatiran ini telah muncul ketika Orde Baru akan mengadakan pemilu pertama (1971), yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang pemilu
2. Boikot terhadap pemilu.
3. Meremehkan pemilu oleh para cendekiawan dan para penulis semi cendekiawan.

Akibat dari banyaknya warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tiap momen pemilihan langsung yang dilaksanakan di negeri ini baik pada pemilihan tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota membuat fenomena golput menjadi sebuah pembicaraan menarik. Mereka yang melihat golput sebagai suatu persoalan, meningkatnya angka golput umumnya dipandang akan mengurangi derajat legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Pada konteks itu, angka golput sering dilihat berbanding terbalik dengan derajat legitimasi. Semakin tinggi angka golput maka semakin rendah derajat legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, semakin rendah angka golput, maka semakin tinggi tingkat legitimasi pemerintahan, institusi-institusi politik dan demokrasi.<sup>10</sup>

Salah satu kelompok sosial di masyarakat yang rentan untuk menjadi golput adalah mahasiswa, hal ini karena tingkat pendidikan yang dimiliki mahasiswa untuk cenderung bertindak secara rasional dalam menentukan sikap politiknya, sikap golput ini karena tidak ada pilihan calon yang layak dan bersih untuk dipilih sehingga mahasiswa menentukan untuk golput, selain itu mahasiswa cenderung bersikap apatis, apolitis dan kritis terhadap pemilu, serta

---

<sup>10</sup> Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku pemilih, dan Kepartaian*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2010) hal. 90

merupakan kelompok yang biasanya teralienasi dari sistem atau proses politik yang ada.

Pada umumnya tingginya angka golput disebabkan oleh dua faktor yaitu:<sup>11</sup>

1. Kurangnya kesadaran politik pemilih.
2. Pemilih yang sudah terdaftar tidak ada di tempat pada saat Pilkada (sedang bekerja di luar daerah/perantauan).

Kota Binjai merupakan kota dengan masyarakat yang mayoritas termasuk masyarakat yang bekerja di luar ataupun di dalam daerah. Oleh sebab itu, sebagian dari masyarakat tidak bisa mengikuti Pilkada saat itu karena tidak bisa hadir.

Dari uraian di atas peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Binjai. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang tidak menyadari arti penting dari menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tergolong tinggi di dasari dengan wawancara terdahulu yang dilakukan peneliti dan hal ini menarik untuk diteliti terutama jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan masyarakat Kota Binjai termasuk dalam golongan masyarakat yang berpendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum?

## **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah dengan judul penelitian “Konsideran Politik Masyarakat Kota Binjai Dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,



Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum”. Adapun yang dimaksud pemilih adalah seluruh masyarakat yang telah memiliki hak suara secara sah menurut hukum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat Kota Binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.
2. Menjelaskan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.

#### **E. Manfaat dan Kegunaan penelitian**

Dari segi teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik tentang pemahaman masyarakat Kota Binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum dan fenomena golongan putih (golput). Selain itu, bermanfaat untuk mengetahui serta memahami teori, konsep dan isu yang berkembang tentang berpengaruh tidaknya tingkat pendidikan pemilih terhadap tingginya angka golput dalam pemilihan umum.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami dengan jelas faktor yang mempengaruhi seseorang (pemilih) pada perilaku memilihnya dalam Pemilu.

#### **F. Kerangka Teori**

Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur dimenangi golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Pilgub DKI Jakarta misalnya.

Jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai angka 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih. Sementara sebagai pemenang, saat Fauzi Bowo terpilih menjadi gubernur, hanya dipilih oleh 2 juta orang pemilih (35,1%).<sup>12</sup> Minat masyarakat yang rendah terhadap pemilu membuat masyarakat makin tidak tertarik dengan pemilu, hal itu secara umum sudah terlihat di beberapa pilkada. Golput (golongan putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik-politik orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara yang kurang baik. Mereka yang golput sebagian besar menganggap para penyelenggara negara dan partai-partai yang ada tidak menyuarakan dan pro-Kebaikan berpolitik. Jadi, daripada memilih partai yang ada lebih baik tidak memilih siapa pun. Anggapan mereka, partai-partai yang ada akan berperilaku buruk pula bila memenangkan pemilu.

Golput bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan. Itu juga tidak dikoordinasi melalui Sistem manajemen. Golput sekadar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau ikut pemilu tetapi dengan cara merusak surat suara. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan biasanya tidak dikenali, bahkan oleh orang yang terdekat, sekalipun. Tentu saja, ada beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golput. Sementara itu, Golput sendiri yang dimaksud disini yaitu kepada kegiatan partisipasi politik masyarakat, Menurut Hantingtong Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi perbuatan-perbuatan pemerintah. Mengenai bentuk partisipasi politik Sudijono Sastodo membagi partisipasi politik menjadi 2, yaitu :

1. Partisipasi Politik aktif adalah : mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat

---

<sup>12</sup> <http://kaltimpost.co.id/berita/detail/golput-apatiss-atau-kritis.html>

pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan dan memilih pemimpin pemerintah.

2. Partisipasi politik pasif Golongan Putih adalah : Masyarakat menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.

Milbrat dan Goel membedakan Partisipasi politik menjadi 4 macam, yaitu:

1. Apatis/ Golongan Putih : Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator : Orang yang setidaknya-tidaknya pernah memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator : Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikasi, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivitas partai dan pekerja kampanye dan aktivitas masyarakat.
4. Pengkritik : Bentuk partisipasi tidak konvensional.

Dalam pemerintahan Demokrasi, Pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan (*field*)

*research*) mengenai faktor konsideran politik masyarakat kota binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Binjai berdasarkan purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

## 3. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah tepat sasaran yakni masyarakat, disini penulis memperoleh sumber data dan informasi dari masyarakat kota Binjai yang melamemiliki hak suara dalam pemilihan umum, maka untuk mencapai efektivitas penelitian ini perlu ditentukan sampel yang diperkirakan dapat mewakili tercapainya data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. sebagai sampel penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki hak suara karena mereka adalah subjek utama penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi dua oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka sumber data yang dimiliki dapat diklasifikasikan kepada :

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan bersifat *kualitatif*. Maka sumber data primer tersebut adalah dari masyarakat kota Binjai.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer yaitu data yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, serta buku-buku yang bersangkutan.

## 5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan beberapa alat pengumpulan data, seperti studi dokumen dan wawancara kepada masyarakat yang memiliki hak suara dalam memilih di pemilihan umum dan tokoh masyarakat dalam menanggapi dampak golput.

### a. Studi Dokumen

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang dijadikan sumber data tentang rekapitulasi perhitungan suara, daftar pemilih tetap (DPT), daftar calon walikota/wakil walikota kota Binjai dan kemudian buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang isinya seputar mengenai pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan dampak yang dirasakan masyarakat akibat golput tersebut. Maka, Sebelum turun kelapangan, penulis terlebih dahulu menulis pokok-pokok pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan penelitian.

### c. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat Induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisi gambaran umum Kota Binjai, letak geografis, sarana dan pra sarana dan hal-hal yang terkait dengan Kota Binjai.

Bab III, terdiri dari Pengertian Pemilu, Sistem Pemilihan Umum, Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, Tujuan Pemilu, Pengertian Golput, dan dampak Golput.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pemahaman masyarakat Kota Binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis Kota Binjai**

Kota Binjai memiliki luas lebih kurang 90,23 km<sup>2</sup>, secara astronomis terletak pada posisi 3° 31' 40" dan 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Bujur Timur dan terletak 28 m di atas permukaan laut. Secara administratif Pemerintah Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

Kota Binjai adalah kota yang beriklim Tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Temperatur udara rata-rata selama 1 (satu) tahun adalah 23,3 ° C s.d. 23,4 ° C dengan kelembaban antara 81 CH dan 83 CH serta curah hujan sebesar 2.195 mm/tahun.

#### **B. Sejarah Singkat Kota Binjai**

Berdasarkan penuturan para orang tua yang di anggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, yang saat ini menjadi kota binjai,dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai.Binjai sebenarnya adalah nama suatu pohon besar,rindang,tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu.pada tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir

Sumatera timur dan dari catatannya di sebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku Mission to The Eastcoast of sumatera-Edinbung 1826). Sebarinya sejak tahun 1822, Binjai telah di jadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai (pungai) atau Kelurahan kebun Lada/Damai.

Perkembangan zaman terus berjalan,pada tahun1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.Nienkyis dan 1866 didirikan Deli Maatschappiy. Usaha unruk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkucuali dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik,Datuk Jalil dan Suling barat yang tidak mau berkerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pembarian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan.Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat Benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Dengan tindakan datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan kapten koops untuk menumpas para datuk yang menentang belanda. Dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan belanda.peristiwa perlawanan ini lah yang menjadi tonggak sejarah dan di tetapkan sebagai hari kota binjai perjuangan para Datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik,Datuk Jalil dan Suling barat dapat ditangkap belanda dan kemudian pada tahun 1873 di buang kecilacap. Pada tahun 1917 oleh pemerintah belanda di keluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana binjai di jadikan Gemente dengan luas 267 Ha.

Pada tahun 1942-1945 Binjai di bawah pemerintahan jepang dengan kepala pemerintahannya adalah kagujawa dengan sebutan guserbu dan tahun 1944 /1945 pemerintahan



kota di pimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J.Runnanbi dengan anggota Dr.RM Djulham,Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan binjai adalah RM.Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T.Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional dan pada masa pendudukan belnda 1947 binjai berada di bawah asisten residen J.Bunger dan RM.Ibnu sebagai wakil wali kota binjai pada tahun 1948 -1950 pemerintahan kota binjai di pegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Abministratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T.Ubaidullah Tahun 1953-1956.Berdasar kan undang-undang Daruat No.9 Tahun 1956 kota Binaji menjadi otonom dengan walikota pertama SS.Parumuhan.

Dalam perkembangan nya kota binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di propinsi sumatera utara telah membenahi dirinyta dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota daerah kota Binjai telah di perluas menjadi 90,23 Km dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan.setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20.perubahan ini berdasarkan keputusan gubenuur sumatra utara No.140-1395 /SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan 6 desa persiapan dan kelurahan persiapan di kota Binjai. Berdasarkan SK gubenuur sumatera utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996,17 desa menjadi kelurahan.

### **C. Pendidikan**

Peningkatan proses belajar dan mengajar penduduk tentunya harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar penyampaian ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2012, sarana Gedung Sekolah Dasar (SD)-MI sebanyak 104 unit, Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP)-MTs sebanyak 33 unit dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), SMK dan MA sebanyak 35 unit. Sementara itu, jumlah guru SD-MI sebanyak 1.189 orang, guru SLTA, SMK dan MA 1.035 orang. Fasilitas tersebut untuk melayani sebanyak 19.862 orang murid SD-MI, 10.796 orang murid SLTP-MTs, dan 12.580 orang murid SLTA, SMK dan MA.

Dilihat dari rasio murid terhadap sekolah, maka diketahui bahwa satu unit SD-MI menampung 191 murid, sedangkan setiap sekolah SLTP-MTs menampung 327 murid dan setiap SLTA, SMK dan MA menampung 373 orang. Sementara itu, rasio murid terhadap guru sebesar 17 murid/guru ditingkat SD-MI, 15 murid/guru ditingkat SLTP-MTs, dan 9 murid/guru ditingkat SLTA, SMK dan MA.

Guru melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, di Kota Tebing Tinggi terdapat 348 unit fasilitas kesehatan dan 510 tenaga medis dan 160 tenaga non medis. Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Tebing Tinggi sebanyak 41 tempat tidur. Selama tahun 2012, dari kasus 10 penyakit terbanyak, kasus penyakit ISPA merupakan kasus tertinggi yang ditangani yaitu sebanyak 21.835 kasus, diikuti dengan penyakit tekanan darah tinggi sebanyak 6.309 kasus dan penyakit pada sendi/ otot sebanyak 4.815 kasus.

Pada tahun 2012 jumlah akseptor aktif sebanyak 15.668 pasangan (68,67 persen dari jumlah pasangan usia subur), dengan akseptor baru 6.618 pasangan. Dari seluruh akseptor aktif, sebagian besar memilih suntik dan suntik sebagai alat kontrasepsi, jumlah masing-masing sebanyak 8.011 pasangan (51,13 persen) dan 4.085 pasangan (26,07 persen).

Jumlah narapidana dan tahanan titipan yang berada di rumah tahanan negara Kota Tebing Tinggi sebanyak 8.667 orang, yang terdiri dari 8.481 orang laki-laki dan 186 orang perempuan.

Selama tahun 2012 di wilayah hukum Kota Tebing Tinggi telah dilaporkan sebanyak 762 peristiwa kriminal, dengan 147 perkara diantaranya merupakan kasus perjudian berat. Berdasarkan pelaporan tersebut sebanyak 460 kasus yang telah diselesaikan.

#### **D. Visi Dan Misi**

Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2010 - 2015 adalah "*Menuju Kota Binjai Idaman yang dinamis, berdaya saing dan nyaman dalam kebersamaan*".

Misi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2010-2015 adalah:

- 1) Membangun Kota Binjai Idaman yang dinamis dan Berdaya Saing
- 2) Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Perekonomian
- 3) Membangun Masyarakat Sehat, Cerdas dan Berbudaya
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas
- 5) Membangun dan Membina Kerukunan Hidup Beragama.

#### **E. Kependudukan**

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Binjai berjumlah 252.652 jiwa yang terdiri dari 125.365 laki-laki dan 127.287 perempuan dengan kepadatan 2.800 jiwa/km<sup>2</sup> dan rata - rata 4,24 jiwa per rumah tangga, dari kecamatan yang terdapat di Kota Binjai, Binjai Selatan mempunyai wilayah yang paling luas sebesar 29,96 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan Binjai Timur, Jumlah penduduk terbanyak diKecamatan Binjai Utara sebanyak 72.417 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Binjai terdapat di Kecamatan Binjai Kota sebanyak 37.700 jiwa.<sup>13</sup>

Distribusi penduduk Kota Binjai secara detail, dapat kita lihat pada tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Binjai Selatan	23.142	22.993	46.135

<sup>13</sup>Data diperoleh dari BPS Kota Binjai pada tahun 2009. Data terbaru tentang kependudukan Kota Binjai adalah 282.415 jiwa dengan kepadatan 3.122,33 jiwa/km<sup>2</sup>.

2.	Binjai Kota	18.831	18.869	37.700
3.	Binjai Timur	26.925	26.867	53.792
4.	Binjai Utara	36.125	36.292	72.417
5.	Binjai Barat	20.342	22.266	42.608
	<b>Total</b>	<b>125.365</b>	<b>127.287</b>	<b>252.652</b>

## F. Ketenagakerjaan

Menurut data yang bersumber dari Kantor Tenaga Kerja Kota Binjai tahun 2009 dari jumlah pendaftar sebanyak 1.491 orang, pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan paling banyak adalah lulusan SLTA sejumlah 970 orang, sedangkan untuk Universitas sebanyak 255 orang.

Berikut Tabel Pencari Kera yang terdaftar berdasarkan Tingkat Pendidikannya :

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
TidakTamat SD	1	2	-
Tamat SD	14	2	6
SLTP	59	34	40
SLTA	1521	2341	970
DI/DII	44	36	26
Akademi/DIII	146	243	192
Sarjana	334	475	255

## G. Perindustrian

Selain dikenal luas sebagai Kota Rambutan, Kota Binjai juga dikenal dengan Industri Kerajinan (*Handycraft Industry*) dan Industri Rumahannya (*Home Industry*). Data menunjukkan bahwa beraneka ragam jenis industri kerajinan dan industri rumahan tumbuh dan berkembang di Kota Binjai, yang pemasarannya tidak hanya terbatas untuk konsumen masyarakat Kota Binjai saja, namun juga sudah menjangkau daerah-daerah lain di sekitarnya.

Secara umum, industri kerajinan di Kota Binjai meliputi beberapa bidang usaha berikut ini :

1. Industri anyaman bambu
2. Industri konveksi
3. Industri kerupuk
4. Industri Meubel bambu
5. Industri tekstil
6. Industri Selai Buah-buahan
7. Industri Tepung dan Terasi
8. Industri Pembuatan Sepatu/Sandal
9. Industri Pembuatan Tahu/Tempe
10. Industri Kecap

Selain industri rumah tangga Sepatu dan Anyam- anyaman, Kota Binjai juga sudah memiliki *Home Industry alat musik Gitar* yang produksinya sudah dipasarkan ke luar Sumatera Utara. Industri Gitar tersebut sebanyak 4 (empat) buah masing–masing di Kel. Sumber Mulio Rejo Kec. Binjai Timur 2 buah dan Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat 2 buah.

#### **H. Pejabat Walikota Binjai**

Sejak pertama kali terbentuk menjadi Kotamadya pada tahun 1947, hingga saat ini Kota Binjai sudah dipimpin oleh 14 orang walikota. Walikota yang pernah menjabat di Kota Binjai adalah :

- |     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1.  | RM. Ibnoe                    | (1947 s.d. 1950) |
| 2.  | H. OK. Salamuddin            | (1950 s.d. 1953) |
| 3.  | T. Ubaidullah                | (1953 s.d. 1956) |
| 4.  | S. S. Paruhuman              | (1956 s.d. 1960) |
| 5.  | Abdullah Raini               | (1960 s.d. 1966) |
| 6.  | Azhari Pulungan              | (1966 s.d. 1968) |
| 7.  | Letkol A. Manan              | (1968 s.d. 1973) |
| 8.  | Mulai Sebayang               | (1973 s.d. 1978) |
| 9.  | Drs. H. A. Soepomo, SH       | (1978 s.d. 1984) |
| 10. | Drs. Syarifuddin             | (1984 s.d. 1989) |
| 11. | Drs. RJ. Hadi Siswoyo Al Haj | (1989 s.d. 1994) |
| 12. | H. Abadi Barus               | (1994 s.d. 1999) |
| 13. | H. M. Ali Umri, SH. MKn      | (1999 s.d. 2010) |

14. H. M. Idaham, SH. MSi

(2010 s.d. sekarang)

## **BAB III**

### **KAJIAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **A. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan: “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*” Mana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “*semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.*” ini adalah prinsipnya.<sup>15</sup>

#### **B. Sistem Pemilihan Umum**

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu :

---

<sup>14</sup> Undang- Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu., h 3.

<sup>15</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM 2010),h.72

a. *Single-member constituency* (satu daerah memilih atau wakil; biasanya disebut Sistem Distrik). Sistem yang berdasarkan pada kesatuan geografis. Jadi setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Kurang memperhitungkan adanya partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.
2. Kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.

Disamping itu sistem ini juga mempunyai kelebihan, antara lain :

1. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
2. Lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai yang mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional
4. Sederhana dan mudah untuk diselenggarakan

b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang). Gagasan pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan



atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Sistem ini ada beberapa kelemahan:

1. Mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya
3. Mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua-partai atau lebih.<sup>16</sup>

Keuntungan *system Propotional*:

- a. *System propotional* di anggap representative, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang di peroleh dalam pemilu.
- b. Sistem ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih egalitarian, karena praktis tanpa ada distorsi.<sup>17</sup>

Di Indonesia pada pemilu kali ini, tidak memakai salah satu dari kedua macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Hal ini terlihat pada satu sisi menggunakan sistem distrik, antara lain pada Bab VII pasal 65 tentang tata cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana setiap partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Disamping itu juga menggunakan sistem berimbang, hal ini terdapat pada Bab V pasal 49 tentang Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana : Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan :

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta:Ikrar Mandirabadi,2007),h. 177

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 467-468

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.<sup>18</sup>

### **C. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia**

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Sembilan kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan di banding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentuka hasil pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h,58-64

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. ,473

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Menurut Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2007, tugas dan wewenang KPU adalah:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai

---

<sup>20</sup> Undang- Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu., h 8.

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini bertugas mempersiapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. MPR juga mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakilnya (Wakil Presiden). MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Di sini, peran Presiden adalah sebagai mandataris MPR, maksudnya Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen keempat tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua tahun 2000 yang berbunyi: "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.*" serta Pasal 22C UUD 1945 hasil Amandemen ketiga tahun 2001 yang berbunyi: "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*" Dalam Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil Amandemen ketiga tahun 2001 dijelaskan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lengkapnya berbunyi:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh

---

<sup>21</sup> Tim Eska Media. *Edisi Lengkap UUD 1945*. (Jakarta: Eska Media. 2002), h.74

persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden<sup>22</sup>

UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>23</sup>

#### **D. Teori Perilaku Politik**

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik<sup>24</sup>. Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku

---

<sup>22</sup> *Ibid*,h. 36-37

<sup>23</sup> *Ibid*. h.51.

<sup>24</sup> Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), h.131.

politik. Perilaku politik dapat dijumpai didalam negara misalnya, ada pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pada dasarnya, manusia yang melakukan kegiatan dibagi menjadi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut<sup>25</sup>.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta system kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap politik. yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut<sup>26</sup>.

Perilaku politik tidaklah sesuatu yang dapat berdiri tegak sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal yang lain. Salah satu hal yang penting adalah sikap politik. sikap dan perilaku sangat erat hubungannya, namun keduanya dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu. Sikap belum merupakan tindakan tetapi masih berupa suatu kecenderungan.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Sudijono, Sastroatmodjo, h. 4.

lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan<sup>27</sup>, perilaku politik adalah:

*“Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”*.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik<sup>28</sup>**

**Pertama**, perlu dipahami dalam konteks latar belakang histories. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

**Kedua**, faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.

**Ketiga**, factor budaya politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia memepengaruhi budaya budi bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.

**Keempat**, perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama

---

<sup>27</sup> Ridwan, Moh. 1997. *Perilaku Politik NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*. Skripsi

<sup>28</sup> Asep Ridwan, *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004*, Jurnal Demokrasi dan HAM (Jakarta : The Habibie Center, 2000), h. 25.



telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan merupakan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai agama dan keyakinannya proses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

*Kelima*, pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.

*Keenam*, factor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

*Ketujuh*, factor lingkungan social politik. faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman. Lingkungan sosial politik saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lain dan bukannya sebagai factor yang berdiri sendiri.

Selain faktor-faktor diatas ada lima faktor lain yang memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan rakyat, yaitu : standar hidup, kondisi gaji atau tidak digaji, kelompok umur, seks, tingkat pendidikan, agama, simpati terhadap partai politik.

## **F. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Perilaku politik dilihat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu melalui pemberian suara (voting), keikutsertaan seseorang dalam kampanye, dan keanggotaan seseorang dalam partai politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilihat sebagai berikut.

### **1. Kampanye**

Kampanye adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian<sup>29</sup>. Sebagaimana yang dikutip di dalam buku perilaku partai politik M.Khoirul Anwar<sup>30</sup>, kampanye juga dapat diartikan sebagai strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang di programkan oleh partai politik. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Kampanye pemilu merupakan kampanye jangka pendek, yang mana ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini public dalam waktu singkat.

Menurut Lock dan Harris<sup>31</sup> didalam Firmanszah kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat secara luas.

Image politik yang akan dibangun harus memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan para pesaing. Kampanye pemilu yang merupakan aktifitas politik ditujukan untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sementara kampanye politik bersifat jangka

---

<sup>29</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>30</sup> Anwar, Khoirul, *Perilaku Partai Politik*, (Penerbit : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), h.40.

<sup>31</sup> Firmanszah, *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, h.272-274.

panjang dan dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik. Image politik yang telah terbangun melalui proses interaksi terus menerus dengan masyarakat tidak mudah hilang dari memori kolektif masyarakat. Sedangkan janji dan harapan politik yang diberikan partai politik semasa kampanye pemilu hanya akan diingat, ditagih selama periode kepemimpinan partai tersebut kalau mereka memenangkan pemilu. Kampanye pemilu adalah sebahagian kecil dari kampanye politik. Meskipun suatu partai atau seorang kandidat tidak berada dalam periode kampanye pemilu, setiap ucapan, tindakan, bahasa tubuh, pemikiran dan aktivitas politik dianalisis oleh media massa dan masyarakat. Sebagaimana yang dituliskan Gelaman King dalam studinya menemukan bahwa preferensi pemilih akan kandidat tertentu sudah terbentuk jauh hari sebelum kampanye pemilu dimulai. Preferensi pemilih tidak dapat dibentuk hanya dengan kampanye yang bersifat jangka pendek.

Larl Popper dalam Dan Nimmo<sup>32</sup> mengemukakan tentang *Teori Pelopor Mengenai Opini Publik*, yang intinya para pemimpin menciptakan opini public karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian di pertimbangkan dan akhirnya diterima. Dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca apa keinginan masyarakat. Seorang calon pemimpin itu harus memiliki kemampuan baik dalam seni berbicara maupun akalunya. Kegiatan kampanye pemilu merupakan sebuah proses untuk mengajak masyarakat (konstituen) untuk bersedia menerima, mendukung dan memilih partai/calon yang diusung. Calon yang di usung ini harus memiliki kemampuan bahasa yang baik, menyampaikan pesan politiknya sesuai dengan keadaan masyarakatnya, misalnya berdasarkan demografinya. Calon yang diusung pun harus memiliki target di dalam kampanye. Siapa-siapa saja yang hendak dijangkau, dan bagaimana strategi yang efektif, melalui

---

<sup>32</sup> Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung Remadja Rosda Karya, cetakan ke empat).

media apa. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam kampanye ini calon harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jenis-jenis kampanye dapat dilihat sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Product-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah commercial campaign atau corporate campaign. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan financial.
2. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.
3. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social. Karena itu kampanye jenis ini disebut sebagai social change campaigns, yakni kampanye untuk menangani masalah-masalah social melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

## 2. Pemberian Suara

Richard G. Niemi dan Herbrt F. Weisberg<sup>34</sup> yang dikutip dalam komunitas embun pagi berpendapat bahwa faktor sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih

---

<sup>33</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009), h.11.

<sup>34</sup> Richard G. Niemi dan Herbrt F. Weisberg, *Controversier of Voting Behavior* yang dikutip di dalam komunitas embun pagi.

seseorang, bukan karena karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku seseorang. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Maka dalam hal ini diperlukan “kurikulum sosialisasi politik”. Ini penting terutama bagi pemilih pemula yang cenderung belum pernah memilih. Harus dilakukan sosialisasi yang sistematis agar pemilih pemula ini dapat mengerti dan tidak menunjukkan karakter yang apatis (tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik), anomie (perasaan tidak berguna). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinat dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

### **3. Partai Politik**

#### **a. Defenisi Partai Politik<sup>35</sup>**

##### **1. Menurut Miriam Budhiardjo**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

---

<sup>35</sup> A. Rahman., h. 102

## 2. Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil.

## 3. Menurut R.H. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

### **b. Asal Usul Partai Politik**

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik<sup>36</sup>. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori yang pertama mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislative dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Masyarakat membentuk partai politik sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk memperjuangkan

---

<sup>36</sup> Ramlan Surbakti, h.113

kepentingan mereka.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modrn yang berstruktur kompleks.pada situasi ini terjadi perubahan, penambahan penduduk, perluasa.

Teori ketiga melihat modernisasi social ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi dan lain-lain yang pada akhirnya mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Dengan demikian teori kedua dan ketiga memiliki kesamaan yakni partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya.

### **G. Perilaku Memilih (*Voting Behavior*)**

Studi-studi perilaku memilih (*voting behavior studies*) dalam suatu pemilu memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Dalam penelitian ini saya menggunakan tiga pendekatan yaitu :

#### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial itu mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakter dan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, status-sosial, ekonomi, aspek geografis dan lain sebagainya<sup>37</sup>. Hal ini dinggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam bentuk perilaku pemilih.

---

<sup>37</sup> Ramlan Surbakti...,h.145.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku memilih seseorang. Aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis voting behavior ini menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan seseorang merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi di mana dia berada seperti profesi, kelas sosial, agama dan seterusnya. Dalam status sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan<sup>38</sup>.

Gerald Pomper<sup>39</sup> memperinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian *voting behavior* ke dalam dua variabel yaitu predisposisi (kecenderungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, terutama pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Apakah preferensi politik ayah atau ibu berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama merupakan faktor sosiologis paling kuat dalam mempengaruhi sikap pilihan terhadap partai-partai politik. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir di dalam kehidupan privat dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Hal ini biasanya berhubungan dengan status ekonomi seseorang. Affan Gaffar menunjukkan bahwa pengaruh kelas dalam perilaku pemilih di Indonesia tidak begitu dominant<sup>40</sup>. Dalam studi-studi perilaku

---

<sup>38</sup> Damsar., h 200.

<sup>39</sup> Gerald Pomper, *Voter's choice : Varieties of American Electoral Behavior*, New York : Dod, Mead Company, 1978, h 198.

<sup>40</sup> A.Rahman Zainuddin., h 48-49



pemilih di negara-negara demokrasi, agama tetap merupakan faktor sosiologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai politik atau kandidat. Dalam hal ini agama diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Dalam hal ini, PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Partai Masyumi, dan lain-lain, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Tapi ke dalam partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam.

Dengan karakteristik keagamaan seperti di atas suatu hipotesis tentang pilihan atas partai politik dapat dinyatakan seperti ini: pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Masyumi, PKB, dan PAN), sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP). Asumsinya bahwa para pemilih yang beragama Islam akan cenderung memilih partai-partai Islam. Yang beragama Kristen akan memilih partai Kristen, dan seterusnya<sup>41</sup>.

## **2. Pendekatan Psikologis**

Menurut penganut pendekatan psikologis, secara metodologis pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti sebagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas social, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan psikologis lebih menekankan faktor-faktor psikologis dalam menentukan perilaku politiknya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan

---

<sup>41</sup> Liddle, William dan Saiful Mujani, “ Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik”, Kompas, 1 September 2000.

perilaku pemilih. Pendekatan Psikologis menjelaskan bahwa sikap seseorang (sebagai refleksi kepribadian seseorang) merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Melalui proses sosialisasi individu dalam mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya di dalam pemilihan umum, sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

### **3. Pendekatan Pilihan Rasional**

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, sosialisasi, pengalaman hidup merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi politik seseorang. Ada faktor situasional yang mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Isu-isu politik ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik. Artinya pemilih pemula dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan rasional<sup>42</sup>, Pendekatan rasional membawa kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena factor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis.

## **H. Pengertian Golput Secara Umum**

Istilah golput atau golongan putih di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu di masa orde baru. Pada masa reformasi, ancaman golput malah semakin meluas tidak hanya di tingkat nasional (pemilu), akan tetapi hingga di tingkat pemilihan kepada daerah (pilkada).<sup>43</sup> Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram.<sup>44</sup> Tulisan bagian pertama ini membahas pengertian secara umum tentang golput dan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena golput. Diharapkan setelah memahami apa dan bagaimana golput, maka akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sikap dan penilaian.

Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar.<sup>45</sup> Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti

---

<sup>42</sup> M. Asfar, "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", Jurnal Ilmu-Ilmu Politik, Vo. 16, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.

<sup>43</sup> Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (PT. Rineka Cipta Jakarta 1994), h. 9.

<sup>44</sup> Kristina S. *Masyarakat Dalam Pemilu: Perspektif Sosial Kapital*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 134-138.

<sup>45</sup> Syarifudin Jurdi. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 154

ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.<sup>46</sup>

Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, ajakan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golput merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.

Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan putih (golput) atau disebut juga 'No Voting Decision' selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (direct voting). Mereka (para pemilih) dikatakan golput atau 'No Voting Decision' apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara.<sup>47</sup> Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput atau 'No Voting Decision' tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>48</sup>

Dalam perkembangannya, keputusan untuk tidak memilih (golput) ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 165

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 166- 167

<sup>48</sup> *Ibid.*,

yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan). Pemilih (voter) tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan. Tentu saja kertas suara yang tidak digunakan tadi dianggap tidak sah. Sikap untuk tidak memilih (no vote) semakin rumit untuk dijelaskan. Mereka (calon pemilih) akan menolak untuk dicatatkan atau didaftarkan namanya sebagai calon pemilih. Caranya bisa dengan menolak untuk dilakukan pendataan ulang atau tidak mengisi formulir calon pemilih. Status sikap mereka yang tidak memilih dengan cara seperti ini tentunya tidak berbeda dengan mereka calon pemilih yang tidak mengetahui proses pendataan ulang sehingga namanya menjadi tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi.

## **I. Klasifikasi Golput**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Golput adalah merupakan bagian dari sikap politik itu sendiri, yang secara pasti memiliki latar belakang kuat dengan politik itu sendiri, baik itu sebagai perlawanan politik ataupun sikap apatis politik terhadap pilihan politik yang ada. Menurut Umar S. Bakrie sedikitnya ada 4 (empat) golongan pemilih Golput ini, yaitu:

1. *Rational voters*, yaitu pemilih yang berorientasi pada program kerja kontestan pemilu, baik *track-record* 5 (lima) tahun sebelumnya bagi yang sudah terpilih dan program kerja dalam kampanye yang akan datang dilaksanakan. Program kerja yang menjadi *concern* mereka ini adalah kinerja partai politik atau kontestan di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program dari partai politik atau kontestan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*). Pemilih rasional ini tidak begitu mementingkan ideologi dari partai politik atau kontestan. Faktor seperti azas, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum.
2. *Critical voters*, yaitu menimbang dan menyesuaikan program kerja dari para kontestan pemilu dengan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam pandangan kelompok ini program kerja

partai politik atau calon tertentu tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi. Namun, juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Sebagai contoh, program meningkatkan pendapatan daerah dengan membuka tempat-tempat perjudian secara logika baik, tetapi bagi konstituen lainnya program itu tidak sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut. Menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suaranya pada partai politik atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.

3. *Traditional voters*, yaitu berorientasi pada ideologi yang kelompok ini anut dan mungkin juga melihat ideologi partai politik yang akan kelompok ini pilih. Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (primordial), agama, dan paham sebagai ukuran untuk memilih partai politik atau calon-calon tertentu dalam pemilihan umum. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan partai politik atau calon-calon tertentu dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah partai politik atau calon-calon tertentu.
4. *Skeptis voters*, yaitu pemilih yang sudah tidak punya kepercayaan pada kontestan yang ikut pemilu karena kelompok ini yakin bahwa siapapun yang akan menang, keadaan dan kesejahteraannya tidak akan berubah. Sebab, itu bagi kelompok ini tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi Golput politis dalam pemilu, walaupun mungkin saja kelompok ini datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau asal contreng.

Berdasarkan klasifikasi Umar S. Bakrie tentang perilaku pemilih ini kecenderungan sikap *skeptis voter* menunjukkan bahwa Golput dalam tahapan ini disebabkan adanya sikap skeptis atau ketidakpercayaan terhadap politik tertentu, baik itu yang berbasiskan agama, budaya atau nasionalis semuanya cenderung tidak membawa perubahan yang signifikan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara ataupun pada kepentingan pribadi dan kelompok para pemilih tersebut. Oleh sebab itu, *skeptis voter* ini lebih cenderung pada sikap apatis tidak sebagai sikap politik dalam artian perlawanan politik.

Dalam kenyataannya menurut Eep Saefulloh Fatah Golput ini dapat diklasifikasi pada beberapa bentuk, di antaranya.

1. Golput teknis, yaitu mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke TPS atau mereka yang keliru mencoblos atau mencontreng sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Golput teknis ini yang tidak memilih lantaran sebab-sebab teknis semacam bingung, tidak percaya, atau kurang informasi.<sup>49</sup>
2. Golput teknis-politis, yaitu mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih disebabkan adanya kesalahan dirinya atau pihak lain seperti lembaga statistik atau penyelenggara pemilu.
3. Golput politis, yaitu mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.
4. Golput ideologis, yaitu mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya, baik itu karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Berdasarkan klasifikasi yang diberikan Eep Saefulloh Fatah ini jelas menunjukkan bahwa Golput tidak hanya berkaitan dengan sikap politik tertentu, tetapi lebih dari pada itu ada juga

---

<sup>49</sup>Eep Saefulloh Fatah, "Partai Semangka, Mangga dan Mentimun", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed, *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden* (Jakarta: AlvaBet, 1999), h. 133.

kecenderungan Golput teknis-politis. Bahkan, dalam beberapa kasus pemilu justru angka Golput teknis-politis ini yang lebih besar angkanya dibanding dengan jenis Golput yang lainnya. Menurut Lembaga Survei Indonesia sebagaimana yang dikutip Muhammad Ramadhan angka Golput ini semakin menguat, terutama pasca reformasi hingga mencapai 40 % dari jumlah masyarakat.<sup>50</sup>

Secara faktual fenomena Golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju juga mengalami hal yang sama, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%.

Secara kondisional faktor penyebab munculnya Golput di negara berkembang dan di negara maju tentunya berbeda. Menurut S.P. Varma bahwa:

“Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.<sup>51</sup>

Karenanya menghadapi fenomena Golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan good public governance. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka

---

<sup>50</sup>Muhammad Ramadhan, “*Pandangan dan Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Pada Pemilu 2009*” (Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2009), h. 7.

<sup>51</sup>S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 295.



fenomena Golput akan mengkrystal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pebangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

Dalam mindset Golput, demokrasi di Indonesia saat ini lebih dimaknai oleh publik, yaitu baru sebatas kebebasan untuk mengkritik Pemerintah dan mengganti pemerintahan melalui Pemilu secara reguler, dan belum menyentuh substansi pembangunan demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Fenomena tersebut, kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan solusi oleh para aktor-aktor pemerintahan (penyelenggara negara) menghadapi Pemilu tahun 2009 agar pesta demokrasi lebih efisien dan berkualitas secara sistemik, baik dalam tataran input, process, dan output, dan malah bukan bersifat kontra produktif dalam berdemokrasi. Dalam arti proses demokrasi malah menurunkan tingkat partisipasi politik pemilih di satu sisi, dan di sisi lain malah makin meningkatnya jumlah Golput yang berimplikasi negatif bagi pembangunan kualitas demokrasi.

Penyebab tinggi angka Golput ini paling tidak disebabkan karena tiga alasan, yaitu 1) sikap masyarakat yang apatis; 2) sikap masyarakat yang kesal dan menolak pemilu; dan 3) tidak masuk dalam DPT.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti ada beberapa klas dari *non-voters* atau Golput dalam setiap proses pemilu, yaitu:<sup>52</sup>

1. *Non-voters* karena kondisi, disebabkan beberapa alasan. Karena punya pekerjaan lain ketika pemilu diselenggarakan, tidak pas waktu dengan kondisi individu pemilih, dan di Indonesia ini khususnya tidak adanya sistem absenty voting, yaitu sistem perwakilan dengan persetujuan dari individu yang memilih.

---

<sup>52</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo Persada, 2003), h. 182.

2. *Non-voters* karena tidak tahu, disebabkan oleh berbagai macam alasan.
3. *Non-voters* karena skeptis, tidak percaya dengan yang dipilih.
4. *Non-voters* yang masuk golongan pemilih siluman, yaitu pemilih yang meninggal dunia atau pindah tetapi masih ada dalam daftar pemilih.

Lebih lanjut menurut Ismanto Golput itu juga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>53</sup>

1. Golput Administratif, yaitu Golput yang disebabkan karena badan penyelenggara pemilu yang teledor dan karena alasan tertentu tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan.
2. Golput Teknis, yaitu Golput yang disebabkan karena faktor teknis, pemilih tidak bisa datang ke TPS karena berbagai macam alasan.
3. Golput Politis, yaitu Orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan (memilih untuk tidak memilih); golput mendekati pengertian *abstain, apathic*.

Demikian juga pemilih yang memilih menjadi Golput bisa disebabkan sebagai kemungkinan.<sup>54</sup>

1. Sikap apatis pemilih yang beranggapan memilih atau tidak memilih, nasibnya dalam hidup ini akan sama saja. Mereka pasrah sebagai objek politik yang tidak berdaya.
2. Mereka tidak peduli pemilu sebab mereka disibuttkkan pekerjaan dan sebagainya. Banyak pemilih lupa hari pencontrengan sehingga tidak datang ke TPS.

---

<sup>53</sup>Ismanto, et.al, *Pemilu Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik* (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi dan Depertemen Politik dan Perubahan Sosial, 2004), h. 124.

<sup>54</sup>Aris Ananta, et. al, *Emerging Democracy in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), h. 19.

3. Simpatisan yang kecewa pada elit partai politik yang tidak mampu menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan, simpatisan ini berubah menjadi apatis ketika partainya tidak konsisten dalam mempertahankan ideologinya.
4. Paket kandidat dan wakil yang kurang “klop”, membuat pemilih khawatir terhadap pilihannya.
5. Konflik internal partai. Misalnya, perpecahan antara NU dan PKB rupanya telah berakibat tidak solidnya suara di kalangan umat. Mereka kebingungan, di antaranya justru menghindari dari pemungutan suara, tidak menghadiri tempat pemungutan suara, atau bahkan meninggalkan kampung tempat tinggalnya untuk berpergian wisata, ziarah dan sebagainya.
6. Karena “jagoannya” sudah kalah pada pemilu putaran pertama maka pemilih yang “tidak bisa pindah ke lain hati” memilih untuk tetap setia dengan tidak memilih calon yang lain.

Berdasarkan penjelasan ini dapat ditegaskan bahwa persoalan Golput bukan hanya sekedar persoalan ketidak terlibatan dalam prosesi pemilu, tetapi lebih dari pada itu juga Golput juga disebabkan banyak faktor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konteks sejarah politik di Indonesia istilah Golput mengemuka ketika Pemilu di masa orde baru. Munculnya kelompok Golput ini merupakan bagian dari perlawanan terhadap politik pemerintah orde baru yang berkuasa saat itu. Sebab, sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa pemerintah orde baru lebih cenderung memaksakan politiknya sehingga banyak kalangan yang merasa terzalimi dengan politik orde baru tersebut maka pilihan tidak memilih atau Golput menjadi alternatif saat itu.

Istilah Golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI

(sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar.<sup>55</sup> Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih.

Tentang sejarah Golput ini Arief Budiman menjelaskan:

Banyak orang bertanya kepada saya, apakah pada pemilu 2004 Golongan Putih alias Golput akan muncul lagi? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengkaji kembali alasan-asalan mengapa orang menjadi Golput. Golput mulai ada pada Pemilu 1971. Pemilu ketika itu diikuti 10 partai politik, yakni partai-partai yang “diperbolehkan hidup” oleh pemerintah Soeharto (setelah Pemilu 1971, jumlah partai tinggal tiga: Golkar, PPP dan PDI). Bagi saya pada waktu itu, dengan membatasi partai, pemerintah telah melanggar asas demokrasi yang paling mendasar...

Semua hal di atas sudah cukup membuat orang yang masih waras berpikir jadi bertanya: Untuk apa pemilu? Untuk apa pemilu kalau yang kita pilih sudah diseleksi? Kita hanya memilih “menu” pemilu yang sudah disediakan pemerintah.

Oleh karena itu, bersama teman-teman waktu itu, saya memboikot pemilu. Gerakan boikot ini kemudian dikenal dengan nama Golongan Putih alias Golput.<sup>56</sup> Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi Golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, tetapi pada bagian yang berwarna putih. Hal ini dimaksudkan tidak mencoblos tepat pada tanda gambar

---

<sup>55</sup>Dwight Y King, *The White Book on the 1992 General Election in Indonesia* (Equinox Publishing, 2010), h. 9.

<sup>56</sup>Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan, 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), h. 105.

yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.

Sedangkan pada masa pasca orde baru berkuasa, tepatnya pada masa reformasi Golput justeru semakin menguta, tidak hanya di tingkat nasional (pemilu), tetapi juga sampai pada tingkat pemilihan kepada daerah (pilkada). Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram.

Adalah menarik untuk ditegaskan bahwa terdapat perbedaan fenomena Golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, ajakan Golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Sedangkan pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian Golput merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.

## **J. Pengaruh Golput terhadap Perkembangan Demokrasi**

Untuk melihat pengaruh Golput terhadap demokrasi, tentu saja harus terlebih dahulu mendefenisikan apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri. Secara teoritis banyak ditemukan defenisi yang dikemukakan para ahli tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi itu. Namun, secara pasti bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan apa yang disebut dengan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Secara lebih teknis defenisi yang dikemukakan Abraham Linclin bahwa demorkasi adalah *... to government of the people, by people, for the peole*<sup>57</sup> [pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat], atau defenisi yang dikemukakan George Bernad Shawa demokrasi adalah *anybody chose by every body* [sebagai siapapun yang dipilih oleh semua orang]. Berdasarkan defenisi singkat ini jelas terlihat bahwa demokrasi adalah masalah kebebasan dalam menentukan pilihan.

---

<sup>57</sup>Azyumardi Azra, *Dari Harvard hingga Mekah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 314.

Bahkan, mungkin termasuk juga tidak memberikan pilihan itu juga sebenarnya merupakan suatu pilihan.

Tampaknya, ini lah yang menjadi landasan menguatnya Golput dalam ranah pemilihan pemimpin dalam beberapa tahun terakhir ini.<sup>58</sup> Dalam beberapa tahun ini tercatat bahwa dalam setahun di Indonesia telah berlangsung 205 kali Pilkada (Tingkat Kabupaten/ Kota Madya). Tingkat rata-rata Golput mencapai 29,3 %. Namun, apabila dilihat per daerah maka tingkat Golput banyak mencapai 30 sampai 40 %. Pengamatan yang lebih jauh pada suara yang menentukan atas kemenangan para kandidat menunjukkan angka yang lebih rendah lagi. Hampir 70 % (137 daerah) kemenangan Pilkada hanya mendapat dukungan suara di bawa 51 %. Salah satu contoh rendahnya dukungan ini.<sup>59</sup> Dilihat dari partisipasi masyarakat didalam mengikuti proses pemilihan umum yang dilakukan Indonesia dilihat dari angka golongan putih atau golput sangatlah bervariasi, yaitu pada tahun 1971 (6,6 %), 1977 (9,1 %), 1982 (8,5 %), 1987(8,7%), 1992 (9,1%).<sup>60</sup>, 1999 (10,07%). Menguatnya angka Golput jelas menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam mensukseskan Pemilu dalam memilih pemimpin. Kenyataan ini jelas memberi pengaruh buruk terhadap pengaruh demokrasi sebab pemilu meminjam istilah Joseph A. Schumpeter adalah barometer kesuksesan jalannya sistem pemerintahan demokratis di sebuah negara. Untuk itu, fenomena Golput atau tidak memilih dianggap sangat membahayakan sendi-sendi demokrasi. Salah satu keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu.

Menguatnya Golput merupakan cerminan ketidakpercayaan dan sikap apatis terhadap institusi pemilu. Masyarakat melihat bahwa mekanisme pemilu dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Di samping itu, sikap apatis dapat juga muncul

---

<sup>58</sup>Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Republika, 2007), h. 14.

<sup>59</sup>*Ibid*, 41.

<sup>60</sup>Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 471.

karena masyarakat meragukan kreadibilitas kontestan pemilu. Golput dapat dikatakan sebagai aksi kolektif untuk mengekspresikan ketidakpuasaan terhadap system yang ada.<sup>61</sup>

Secara realita dapat dikatakan kalangan yang tidak siap dengan demokrasi adalah sementara elite politik dan orang-orang terpelajar yang karena alasan-alasan tertentu untuk memutuskan untuk tidak memberikan suara mereka dan bangga dengan sikap tersebut. Sikap Golput mereka diekspos secara luas oleh medi masaa dan mereka telah memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Sementara rakyat memberikan suara mereka secara terbuka menyatakan diri mereka Golput dan rakyat sebenarnya tahu apa alasan mereka menjadi Golput; rakyat tidak senaif yang mereka perkirakan.<sup>62</sup>

Fenomena golput dapat diidentikkan dengan perilaku memilih, karena perilaku memilih itu sendiri dalam khasanah ilmu politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum apakah memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jika memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya maka ia akan memilih salahsatu kandidat baik itu calon perseorangan maupun partai yang ditawarkan dalam pemilihan umum. Sedangkan bila berlaku sebaliknya alias tidak menggunakan hak pilihnya maka yang bersangkutan akan memilih untuk golput alias tidak memilih sama sekali calon maupun partai yang berkompetisi memperebutkan dukungan rakyat dalam pemilu.

---

<sup>61</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Anatara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), h.51.

<sup>62</sup> Azra, *Dari Harvard ...*, h. 108.

## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Pendapat Masyarakat Kota Binjai Tentang Kewajiban Memilih di Pemilu Kota Binjai Tahun 2015.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.<sup>63</sup>

Keterlibatan masyarakat Kota Binjai dalam pemilu bisa dikatakan belum maksimal, karena bagi masyarakat Kota Binjai memilih pemimpin masih merupakan persoalan antara hak atau sebuah kewajiban. Adapun masyarakat Kota Binjai yang berpendapat bahwa pemilu merupakan kewajiban memiliki alasan bahwa mencoblos adalah "merupakan sebagai warga negara yang baik", sebagaimana Sudirman mengatakan: Menurutny, memilih adalah kewajiban dan orang yang telah ikut serta memilih pemimpinnya adalah orang yang sadar sebagai warga negara.<sup>64</sup>

Ali Muda selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara: menyebutkan bahwa umat Muslim yang tidak ikut Pemilu itu sama saja sudah melakukan

---

<sup>63</sup> <http://duniabembi.blogspot.com/2013/09/partisipasi-politik-masyarakat-dalam.html>, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU, diakses tanggal 25- 06- 2015.

<sup>64</sup> Sudirman selaku masyarakat Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.



perbuatan dosa. Menurut Ali Muda, Pemilu itu juga secara tidak langsung akan menentukan nasib umat Islam di Indonesia. Jadi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah orang yang tidak mementingkan nasib bangsanya padahal Rasul mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Dan bukankah MUI juga telah mengharamkan Golput.<sup>65</sup>

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yang berlatar pendidikan tinggi membawa hasil yang berbeda, bahwa semakin tinggi pendidikan responden yang diwawancarai berpendapat Pemilu itu hak, bukan sebagai kewajiban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramadhan Lubis: Dalam Undang- Undang tentang Pemilu yaitu WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Jelas kata yang tercantum adalah “hak”, bukan “kewajiban”.<sup>66</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh M. Yazid: Dalam produk hukum tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak. Terserah pemilihnya.<sup>67</sup> Lebih lanjut M. Yazid mengatakan, dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak.<sup>68</sup>

Iskandar juga menambahi bahwa memilih dalam pemilu adalah hak bukan kewajiban. Alasannya adalah partisipasi dalam pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi; bukan suatu kewajiban. UUD RI Tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Sebagai hak, maka hukum

---

<sup>65</sup> Ali Muda selaku masyarakat Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

<sup>66</sup> Ramdhan selaku masyarakat Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

<sup>67</sup> M. Yazid, selaku masyarakat Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 02- 06- 2015.

<sup>68</sup> Iskandar, selaku masyarakat Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

dasar dari penggunaan hak pilih adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum fiqih: “Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh”. Lebih lanjut Iskandar mengatakan. Jadi, jangan mau ditakut-takuti. Kalau mau memilih, silahkan memilih. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak memilih, itu juga hak Anda. Gunakan hak Anda tanpa ketakutan. Ini sudah era reformasi, bukan lagi era ditakuti dengan ancaman basi.

Manatan Komisioner KPU Kota Binjai Muhammad Yusuf juga memberikan pandangannya bahwa Fatwa haram MUI, hal tersebut cukup membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, akan tetapi mengenai keberhasilan fatwa tersebut dimasyarakat tidak memiliki ukuran yang jelas, hal ini sebaiknya disosialisasikan pada umat muslim terutama pada saat acara-acara keagamaan seperti wirid,dll. Hal ini kembali pada diri masing-masing, yang menjalankan agama sesuai syariat islam, dengan landasan iman untuk mentaati ulil amri (pemimpin).<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Kota Binjai mengenai pemilu terjadi dua pemahaman yang sangat berbeda. Sebagai masyarakat berpendapat pemilu adalah hak, dan pendapat masyarakat bahwa pemilu merupakan hak pada umumnya memiliki pendidikan yang berlatang belakang tinggi di bandingkan masyarakat berpendapat bahwa memilih dalam pemilu merupakan kewajiban.

## **B. Penilaian Masyarakat Kota Binjai Terhadap Pasangan Pemilu Yang Dipilih.**

Dari data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa terdapat 62 orang (51,2%) diantaranya memiliki penilaian-penilaian tertentu terhadap pasangan seperti pada pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Binjai yang dipilih pada priode yang lalu. Ini berarti bahwa sebagian besar responden adalah pemilih rasional. Sementara itu 27 orang responden (22,3%)

---

<sup>69</sup> Muhammad Yusuf, SH, MH, selaku Komisioner KPU Kota Binjai Tahun 2011, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

yang memilih tetapi tidak memiliki penilaian terhadap pasangan yang mereka pilih. Adapun penilaian-penilaian termaksud meliputi penampilan, program kerja, karakter/latar belakang, dan lain-lain. Data mengenai penilaian responden terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I**  
**Penilaian Responden dalam Memilih Pasangan**  
**Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota**

No	Pertimbangan Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Penampilan/Performance	36	58,1 %
2	Program Kerja/platfom	26	41,9 %
3	Latar Belakang/Karakter Pribadi	41	66,1 %
4	Lain-lain	5	8.1 %

Sumber: Kuesioner

Data yang ada dalam tabel I menunjukkan bahwa karakter/latar belakang pribadi kandidat menjadi pertimbangan paling penting bagi pemilih yang tergolong rasional. Terdapat 41 orang (66,1%) yang mendasarkan penilaiannya pada persoalan tersebut. Sedangkan pertimbangan kedua adalah penilaian terhadap penampilan/performance dari pasangan calon. Responden yang mendasarkan penilaiannya pada penampilan/performance pasangan calon sebanyak 36 orang (58,1%). Sementara itu 26 orang lainnya (41,9%) menilai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dari program kerjanya. Sedangkan 5 orang responden (8,1%) menjawab lain-lain. Lain-lain di sini antara lain adalah anggapan pemilih yang menilai bahwa calon tersebut mampu memenuhi janji-janjinya. Sementara itu sejumlah 10 responden indepth interview yang menggunakan hak pilihnya mengaku memiliki penilaian terhadap pasangan yang dipilih, sedangkan 5 orang diantaranya tidak memiliki penilaian terhadap pasangan calon

karena tidak menggunakan hak pilihnya.

Berkenaan dengan hal di atas, dalam wawancara mendalam ketika ditanya apakah responden memiliki penilaian terhadap pasangan yang dipilih, Sri Susilawati selaku masyarakat Kota Binjai mengatakan hal sebagai berikut:

“Iya, yang pertama ketika memilih calon pemimpin hendaknya melihat bagaimana penampilannya di depan publik karena calon tersebut merupakan pemimpin dari masyarakat jadi dengan melihatnya di depan publik kita masyarakat bisa menilai apakah calon tersebut memang sudah pantas/ layak dipilih atau tidak, begitu juga dengan mendengarkan apa langkah yang diambil ketika terpilih program kerja apa yang bisa di tawarkan kepada masyarakat dan bagaimana latar belakang kehidupannya apakah pernah tersangkut kejahatan atau tidak bagaimana pendidikannya, saya kira itu semua perlu di perlihatkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menentukan pilihan dengan yakin dan bila itu bisa disampaikan maka memang sudah selayaknya calon tersebut menjadi pemimpin bagi masyarakat.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa Sri Susilawati menilai pasangan yang ia pilih berdasarkan pada penampilan, program kerja, dan latar belakang/karakter pribadinya. Di lain pihak, Eni W (32 tahun), seorang guru, mengatakan hal sebagai berikut:

“Ya ketika kita memilih calon pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, ya kalau saya sendiri mungkin pertimbangannya, dari sekian calon yang kemarin itu, pasangan calon itu, pertimbangan saya yang pertama yaitu dia bisa mempertanggungjawabkan apa yg telah dia kampanyekan, ya semoga saja harapan saya mereka bisa menepati janji yang telah mereka ucapkan, gitu saja. Kalau dari segi penampilan, kalau dibilang penmpilan itu gini, saya tuh kan belum pernah ketemu langsung, jadi saya tidak kenal dengan pribadi mereka. Jadi kalau dibilang secara fisik saya mungkin cuma tahu dari fotonya tok. Kalau dari fisiknya, orangnya pantas sebagai seorang pemimpin, tapi bukan berarti bahwa seperti itu Anda kemudian mengatakan saya milih dia. Menurut saya orangnya sih sebenarnya dilihat dari fisik orangnya pantas,

---

<sup>70</sup> Sri Susilawati, selaku masyarakat Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

berwibawa, kalau dilihat dari cara dia ngomong, itu juga meyakinkan kalau dari pribadi yang lain saya tidak tahu.<sup>71</sup>

Siti Nur Hidayah mengungkapkan penilaiannya terhadap pasangan yang ia pilih terutama berdasarkan program kerjanya, kemudian latar belakang dan penampilannya. Sementara itu Maskur (48 tahun) tidak menilai dari penampilannya, melainkan dari visi misi dan latar belakangnya. Berikut ungkapan Maskur:

“Penilaian, tidak dari penampilan. Saya melihat dari visi dan misi calon. Saya tidak hapal itu visi misinya, yang jelas untuk membangun Kota Binjai secara adil lah yang jelas terus meningkatkan ke kesejahteraan masyarakat dari tingkat masyarakat kecil sampai menengah.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar pemilih di Kota Binjai adalah pemilih rasional yang mendasarkan pilihannya atas penilaian-penilaian tertentu, baik dari segi penampilan (performane), program kerja (platform), latar belakang/karakter pribadi, maupun lain-lain.

### **C. Sumber Untuk Memperoleh Rujukan Tentang Penilaian-Penilaian Terhadap Pasangan Pemimpin Di Pemilu.**

Informasi seputar Pemilu sangat penting untuk mengetahui serba-serbi pasangan calon. karena bisa menjadi acuan untuk menilai pasangan calon yang akan dipilih. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa terdapat 62 orang responden yang mempunyai penilaian-penilaian terhadap pasangan yang dipilih, maka penilaian-penilaian tersebut diperoleh dari beberapa sumber rujukan. Data mengenai dari mana rujukan tentang penilaian-penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II

---

<sup>71</sup> Eni W, selaku masyarakat Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 22- 06- 2015.

<sup>72</sup> Siti Nur Hidayah, selaku masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 23- 06- 2015

Sumber penilaian terhadap pasangan  
Calon Wali Kota Binjai dan Wakil Walikota Binjai di pemilu

No	Sumber Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Perorangan (Teman, Tetangga, Keluarga, Tokoh Masyarakat)	39	62,9 %
2	Kelompok	-	0 %
3	Organisasi	7	11.3 %
4	Media Masa	46	74,2 %

Sumber: Kuesioner

Tabel II di atas menunjukkan bahwa media massa menjadi sumber informasi terbesar bagi responden untuk memberikan penilaian terhadap pasangan Calon Wali Kota Binjai dan Wakil Walikota Binjai di pemilu lalu. Terdapat 46 yang menjadikan media massa sebagai sumber acuan tentang penilaian terhadap pasangan calon yang dipilih. Sedangkan 39 responden memiliki penilaian terhadap pasangan yang dipilih dari sumber perorangan, yaitu teman, tetangga, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Responden yang memperoleh sumber penilaian dari organisasi sebanyak 7 orang. Sementara itu tidak ada seorangpun responden yang memperoleh informasi melalui kelompok.

Beberapa responden dalam wawancara mengatakan memperoleh rujukan dari media tentang penilaian terhadap pasangan yang dipilih, terutama televisi dan surat kabar. Himawan Subagyo mengaku memperoleh rujukan dari media, hal itu diungkapkannya dalam wawancara mendalam sebagai berikut:

“Ya saya melihat pertama dari kiprah mereka itu kan juga sering dimuat di media. Saya melihat dari program, visi misi calon itu kan ada, paling ndak bisa menilai lah. Sebenarnya sih ndak bisa dikatakan seratus persen ya, karena visi misi itu kan tulisan, tapi kan itu curahan hati, minimal itu yang bisa dijadikan acuan. kayaknya itu yang lebih

religius. Dari media dan dari itu, visi misi yang disalurkan lewat KPU”.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Himawan Subagyo, selaku masyarakat Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 28- 06- 2015

#### **D. Alasan Masyarakat Kota Binjai Untuk Memilih Golput Dalam Pemilukada Walikota Binjai Tahun 2015.**

##### **1. Pemilu tidak memberikan perubahan.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Marwan tentang Golput di Kota Binjai adalah: dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun sebelumnya memang masih ada beberapa aspek yang belum membaik, namun peningkatan mutu di beberapa aspek perlu juga diapresiasi/ dihargai. Tetapi tetap saja masyarakat menilai itu sebagai kegagalan karena masih adanya janji- janji di waktu kampanye belum di tetapi. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Kota Binjai menjadi kurang beminat untuk ikut serta kembali dalam pemilihan khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota Binjai karena dianggap hasilnya begitu- begitu saja sama dengan sebelumnya.<sup>74</sup>

Sama halnya komentar yang di sampaikan oleh Bapak Jumardi: bahwa masyarakat melakukan golput dalam pemilihan legislatif khususnya bagi Walikota Binjai tidak membawa perubahan yang baik bagi masyarakat Kota Binjai, dan ini terbukti bahwa Walikota Binjai yang sekarang dan sebelumnya sama saja hanya bisa memberikan janji- janji.<sup>75</sup>

Keterangan yang tidak jauh berbeda juga di berikah oleh Ibu Latifah, bahwa masyarakat Kota Binjai melakukan golput karena masyarakat sudah bosan ditipu dengan janji kosong, dan tidak membawa Kota Binjai pada perubahan yang lebih baik, lihat saja Binjai ini jalannya masih banyak yang rusak, uang sekolah mahal dan tidak ada perbedaannya dengan Walikota yang sebelumnya.<sup>76</sup>

##### **2. Tidak tertarik dengan politik.**

---

<sup>74</sup> Marwan selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

<sup>75</sup> Jumardi selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

<sup>76</sup> Latifah, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.



Adapun alasan masyarakat Kota Binjai untuk melakukan golput diantaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rahmat: Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dan kebijakan yang akan menentukan seperti apa bangsa ini ke depan. Jika negara ini amburadul di masa yang akan datang, maka yang pertama kali “bertanggung jawab” adalah partai yang mengusung calon kandidat dari partainya, tetapi kata-kata itu hanya sebatas harapan pada konsep yang seharusnya terjadi karena dalam kenyataannya ketika ketika calon legislatif yang terpilih dan dalam perjalanannya tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan harapan dan masih adanya janji-janji yang belum di tepai seharusnya partai politik yang mengusungnya melakukan tindakan terhadap calon yang terpilih, tetapi hal itu tidak dilakukan sama sekali. Oleh karena itulah masyarakat Kota Binjai sebagian memiliki pendapat bahwa berpolitik hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepada kelompok tertentu saja.<sup>77</sup>

Sedangkan alasan Bapak Jamal adalah kami bosan melihat perpolitikan yang ada di Indonesia ini hanya mementingkan sebagian pihak saja. Kata ini demi rakyat, berjuang untuk rakyat hanya kata-kata bohong agar dirinya terpilih dan ketika para calon legislative terpilih maka yang terjadi adalah selamat tinggal rakyat. Ini adalah kenyataan yang terjadi dan berangkat dari kenyataan inilah masyarakat khususnya Kota Binjai banyak memilih sikap untuk tidak ambil pusing lagi dengan politik.<sup>78</sup>

Sedang dari ibu-ibu Kota Binjai banyak memberikan pendapat tentang perpolitikan di Indonesia ini sebagaimana yang dikatakan ibu Rahma bahwa kami hanya ibu rumah tangga tidak tahu menahu tentang politik yang kami tahu hanya bagaimana menaruh harapan kepada calon pemimpin dan ketika harapan kami tidak di dengarkan

---

<sup>77</sup> Rahmat, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

<sup>78</sup> Jamal, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.

maka kami akan belajar untuk tidak menaruh harapan untuk kedua kalinya karena orang bodoh tidak akan jatuh pada lubang yang sama sebanyak dua kali.<sup>79</sup>

3. Tidak menemukan calon yang sesuai.

Alasan masyarakat Kota Binjai melakukan golput khususnya pada pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011 sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ramli adalah Calon wakil rakyat harus dipandang sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Sebagaimana halnya kita. Dan parpolnya pun juga harus dipandang sebagai kumpulan manusia, bukan malaikat. Sehingga berbuat salah dan memiliki kekurangan itu selalu memiliki ruang. Hanya saja perlu ditelaah lebih dalam. Bagaimana intensitas kesalahannya? Bagaimana perlakuan/ tindakan dari parpolnya? Bagaimana sistem dan orang-orang di dalamnya? Dan tak lupa bagaimana keseharian pelakunya? Memang pepatah mengatakan “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Namun, tak seorang pun mau, karena sebuah kesalahan, lantas dicap sebagai manusia paling buruk sedunia, selamanya. Sebagaimana sebuah keluarga tidak ingin disebut keluarga maling, hanya karena salah satu anggotanya yang melakukan. Serta seberapa parah dampak kesalahannya? Merugikan diri sendiri atukah merugikan bangsa dan negara?. Tapi sejauh ini sangat disayangkan bahwa dimana masyarakat sudah begitu pemaafnya terhadap pemimpinnya dalam setiap kesalahan ataupun kekeurangan dalam menjalankan kepemimpinannya tetap saja pemimpin yang terpilih tidak mau tahu dengan kesalahan yang dilakukannya. Disinilah masyarakat menilai bahwa golput adalah jawaban untuk menyatakan sikap diantara calon- calon pemimpin khususnya dalam pemilihan Walikota Binjai tidak ada pilihan untuk dipilih.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Rahma, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.

<sup>80</sup> Ramli, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Lebih lanjut Bapak Soleh memberikan komentar bahwa golput adalah jawaban masyarakat khususnya masyarakat Kota Binjai dalam pemilihan Walikota Binjai Tahun 2011. Golput pada pemilihan calon Walikota Binjai pada Tahun 2011 adalah jawaban karena masyarakat menilai tidak adanya calon yang pantas untuk dipilih.<sup>81</sup>

4. Banyak urusan saat coblosan.

Diantara alasan- alasan masyarakat Kota Binjai untuk menjadikan Golput sebagai pilihan, alasan yang paling umum dijumpai dalam masyarakat khususnya Kota Binjai untuk memilih golput adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Irwan adalah karena adanya urusan diluar daerah sehingga dirinya tidak bias ikut serta dalam pemilihan khususnya pada pemilihan calon Walikota Binjai pada Tahun 2011 kemarin.<sup>82</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Supriadi, saya golput karena kemaren ada urusan keluarga di rumah di tambah lagi tempat TPS yang jauh sehinggasaya melakukan golput pada pemilihan Walikota Binjai di Tahun 2011 yang lalu. Dan alasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Surya, Alwi, Wahyu dan Rasyid bahwa alasan mereka melakukan golput karena adanya pekerjaan yang dianggap penting sehingga melakukan golput pada pemilihan Walikota Binjai pad Tahun 2011 yang lalu.<sup>83</sup>

5. Tidak puas dengan kinerja partai politik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaya bahwa Ini masih berkaitan banyak masyarakat Kota Binjai dalam melakukan golput pada Tahun 2011. “Masyarakat tidak bias begitu saja disalahkan karena melakukan golput dalam setiap pemilihan legislatif. Karena dapat kita lihat sendiri masih ada sajanya politisi yang terjerat kasus

---

<sup>81</sup> Soleh selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

<sup>82</sup> Irwan, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

<sup>83</sup> Supriadi, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.

hukum. Sehingga Partainya pun kena imbas dan turut “bertanggung jawab”. Alasan inilah yang membuat sebagian masyarakat melakukan golput khususnya pada pemilihan Walikota Binjai 2011 kemarin.<sup>84</sup>

#### 6. Politik itu kotor.

Stigma ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja politisinya. Politik itu uang, sikut kanan sikut kiri. Tidak ada teman abadi, melainkan kepentingan abadi. Inilah alasan yang disampaikan oleh Ibu Fitri sehingga dirinya melakukan golput pada setiap pemilihan.<sup>85</sup> Sedangkan Bapak Rudi memberikan komentar: Memang bukan politiknya yang kotor, tetapi politisinya yang masih bermain kotor. Inilah yang menjadikan masyarakat muak dengan pemilu di Indonesia, sehingga golput adalah pilihan bagi masyarakat untuk menunjukkan kekecewaannya.<sup>86</sup>

### **E. Kondisi Pelaku Golput Pada Masyarakat Kota Binjai.**

#### 1. Kondisi Teknis

Sebagian besar responden mendapatkan kartu pemilih dan undangan (92%). Namun apabila melihat pemilihan ini bagi responden adalah sebuah hak, maka sekecil apapun prosentase yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan (8%), sebenarnya hal ini tidak harus terjadi. Fenomena inilah yang menjadi perdebatan selama ini, banyak masyarakat yang menuntut kepada pihak-pihak terkait karena dirinya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2011.

Sedangkan alasan teknis lainnya adalah keadaan dimana kemungkinan responden memiliki kegiatan lain yang dapat menghalangi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh, mayoritas responden

---

<sup>84</sup> Jaya, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

<sup>85</sup> Fitri, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.

<sup>86</sup> Rudi, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.

memiliki kegiatan lain yang menghambat untuk memberikan suaranya (63%). Kebanyakan dari responden lebih mementingkan kebutuhan ekonomi daripada mengurus kegiatan Pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011 yang lalu menurut mereka tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

## 2. Kondisi Politis

Mayoritas responden yang berhasil peneliti jaring, mereka beranggapan bahwa dengan adanya Pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011 yang lalu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Sebanyak 67% responden meyakini hal ini, karena sikap apatis yang sangat tinggi. Sikap apatis ini bukan tanpa alasan, responden pada umumnya telah jenuh terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit itu sendiri. Terlebih, ketidakpercayaan responden juga semakin tinggi karena setiap kali diadakannya perebutan kursi kepemimpinan, mereka selalu saja disuguhkan dengan adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang teramat fulgar dari para kandidat. Fenomena demikian semakin meyakinkan responden bahwa setiap kali diadakannya perhelatan pemilihan pemimpin semacam Pilgub ini, responden hanya dijadikan sebuah alat untuk mengantarkan kandidat untuk menggapai ambisi kekuasaannya. Setelah mendapatkan kekuasaan itu, sebagaimana sebuah alat yang sudah terpakai fungsinya, maka akan dibuang begitu saja karena sudah hilang nilai manfaatnya. Demikian halnya anggapan responden. Setelah pemilihan berakhir, maka mereka akan terlupakan begitu saja.

Sejalan dengan itu, mayoritas responden (63%) juga menganggap bahwa dari segi sistem pemerintahan, dengan diadakannya Pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011 tidak akan membawa perubahan yang mendasar. Sistem birokrasi yang sudah sedemikian parahnya ini akan tetap sulit untuk adanya kemungkinan sebuah restrukturisasi.

### 3. Kondisi Ideologis

Secara ideologis, mayoritas responden menilai bahwa perhelatan Pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011 yang lalu adalah instrumen yang tepat dalam memilih seorang pemimpin (Walikota), yakni sebesar 71%. Responden pada umumnya sepaham bahwa pengalaman masa lalu tentang sebuah demokrasi yang terkekang harus diubah, dan cara yang paling tepat untuk perubahan tersebut adalah dengan proses pemilihan pemimpin secara langsung oleh masyarakat sebagaimana Pemilihan Walikota Binjai pada Tahun 2011.

Berkaitan dengan anggapan responden pada pendekatan politis, dimana mayoritas responden menganggap bahwa tidak akan adanya perubahan pemerintahan kearah yang lebih baik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di lain sisi mayoritas responden menganggap bahwa sistem pemerintahan yang telah berlangsung ini sudah tepat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sistem pemerintahan yang sedang berlangsung ini sudah sesuai, namun menurut responden sistem ini dalam prakteknya masih kurang tepat.

#### **F. Dampak Golput Menurut Masyarakat Kota Binjai Bagi Pemerintah.**

Sebagaimana Bapak Muhammad Yusuf selaku Komisioner KPU Kota Binjai mengatakan: Selama menjabat sebagai Komisioner KPU dalam 1 periode, Pemilukada pertama pada tahun 2010, kemudian dibatalkan dan diadakan ulang pada tahun 2011 terlihat partisipasi masyarakat yang menurun apalagi pada pemilihan legislatif ditambah pula pada pemilihan gubernur/wakil gubernur juga terjadi penurunan partisipasi masyarakat.<sup>87</sup>

Mengenai masalah golput, ini adalah masalah yang berkaitan tentang rendahnya pendidikan politik pada masyarakat. Kesalahan ini bukan menjadi kesalahan yang dititik pusatkan pada KPU, tetapi menjadi tanggung jawab dari para kader partai politik dan juga

---

<sup>87</sup> Muhammad Yusuf selaku Komisioner KPU Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

pemerintah. Sebab KPU hanya mempunyai tanggung jawab mensosialisasikan pemilu, mengayomi masyarakat disaat menjelang dilaksanakannya pemilu. Jadi KPU hanya memiliki waktu yang terbatas untuk hal tersebut. Jadi menurut saya landasan masyarakat melakukan golput adalah disebabkan :

- a. Rendahnya pendidikan politik masyarakat, seharusnya diadakan sosialisasi yang berkala dari partai politik supaya lebih menyentuh rasa sadar masyarakat utk lebih tau pentingnya memilih kepada daerah, dan juga pentingnya memilih partai politik.
- b. budaya di kabupaten dan budaya pemilukada di wilayah Kota berbeda, yakni budaya Money politik yang terjadi di masyarakat, sebab kabupaten luas wilayahnya jauh lebih besar dibanding kota sehingga persentasenya lebih rendah terjadi, kalau wilayah kota luas daerahnya jauh lebih kecil jadi lebih besar kemungkinan hal itu terjadi sehingga menjadi hal yang membudaya.<sup>88</sup>

Sekretaris Bidang Hukum MUI Kota Binjai, Muhammad Yusuf, SH, MH mengatakan "golongan putih" pada pemilu bakal berdampak negatif terhadap pembangunan karena mengakibatkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik menurun. "Mengabaikan hak pilih pada pemilu menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan nasional,"<sup>89</sup>

Lebih lanjut Muhammad Yusuf mengatakan, dampak negatif dari pengabaian hak pilih antara lain mengakibatkan program pembangunan yang disiapkan pemimpin terpilih berpotensi tidak didukung sebagian penduduk. Hal itu, karena penduduk yang golput atau tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu dapat dengan mudah menganggap bahwa dirinya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> Muhammad Yusuf, SH, MH, selaku Sekretaris Bidang Hukum MUI Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 05- 06- 2015.

<sup>90</sup> *Ibid.*,

Selanjutnya Rusdi Khalid selaku tokoh masyarakat Kota Binjai mengatakan, “Dampak negatif lainnya adalah kelompok golput berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan "sabotase" atas berbagai program yang telah disusun oleh pemerintah hasil pemilu. "Risiko ini dapat berupa pembelokan arah pembangunan, maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan," ucapnya.<sup>91</sup>

Sugiono salah satu Camat di Kota Binjai juga menuturkan bahwa kelompok golput secara politis merasa berada di luar sistem sehingga mereka tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada pemerintah terpilih. "Semakin tinggi prosentase masyarakat yang ikut mempergunakan hak suaranya, maka semakin tinggi kualitas demokrasi kita yang masih berusia muda ini”.<sup>92</sup>

Sementara Agus Salim selaku salah satu Kader Partai Golkar mengatakan "golput" atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilu tidak menyelesaikan masalah untuk perbaikan pemerintahan yang akan datang. masyarakat perlu memberikan hak suaranya dan fokus kepada calon pemimpin serta wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk mereka.<sup>93</sup>

Sedangkan sebagian masyarakat Kota Binjai, seperti Iskandar selaku Mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Binjai, menyatakan bahwa tindakan abstain atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum yang biasa dikenal dengan Golongan Putih (Golput) bukan merupakan tindakan kriminal. "Mekanisme abstain atau tidak memilih dikenal secara. Bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenal hasil abstain dalam setiap pemungutan suara”.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Rusdi Khalid, selaku Tokoh Masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 03- 06- 2015.

<sup>92</sup> Sugiono, selaku Camat Binjai Utara Tahun , wawancara penulis, Binjai, Tanggal 04- 06- 2015.

<sup>93</sup> Agus Salim, selaku Kader Partai Golkar Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 07- 06- 2015.

<sup>94</sup> Iskandar, selaku Masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 05- 06- 2015.



## G. Analisis Penulis

Penilaian bahwa orang-orang yang golput merupakan kelompok yang apatis terhadap dunia politik di negerinya sendiri. Seolah pilihan golput tidak memiliki orientasi terhadap politik. Sebenarnya patutkah mengatakan bahwa mereka semua yang memilih untuk golput adalah orang yang tidak peduli dengan aktivitas politik di negerinya sendiri? Mungkin saja bisa, namun kata “semua” perlu digarisbawahi karena penulis rasa tidak semua yang golput adalah orang yang tidak peduli terhadap politik di negerinya. Jika kita ingin membuka tirai lebih lebar dan meneropong lebih dalam mungkin kita dapat melihat lebih jelas sebenarnya apa yang mendorong mereka untuk menjadi golput selain alasan yang bersifat *common*, seperti tidak adanya orientasi pada politik dalam diri orang tersebut.

Sebagai agen sosialisasi politik, baik media, calon pemimpin, dan orang-orang lain di sekitar kita khususnya *peer groups* mempunyai peranan penting dalam membentuk orientasi politik seorang individu. Ketika waktu pemilihan calon pemimpin sudah dekat biasanya media atau pun pembicaraan sehari-hari akan cenderung lebih banyak membahas soal calon-calon pemimpin. Media mulai menelanjangi kebobrokan dari setiap calon, lalu ada orang-orang di sekitar yang menyampaikan rasa suka atau tidak sukanya pada calon tertentu karena faktor ini dan itu. Para calon pun semakin gencar melakukan kampanye dan mempublikasikan program kerja mereka yang terlihat *begitu hebat*. Agen-agen ini mensosialisasikan nilai-nilai yang menentukan perilaku politik seseorang di hari H pemilihan.

Menurut penulis pilihan golput pada masyarakat Kota Binjai terjadi salah satunya karena faktor dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh partai, Tiem Sukses, Media kepada masyarakat. Seperti Media mengatakan A, Tiem Sukses mengatakan B, dan calon mengatakan C. Terdapat tiga nilai di sini dan ketiga nilai tersebut belum tentu sama, bahkan terkadang terlihat

adanya perang di antara nilai-nilai itu. Seseorang yang disosialisasikan nilai-nilai yang berbeda akan mengalami konflik pribadi. Orang tersebut akan menjadi bingung dan tidak tahu harus memegang nilai yang mana. Di sini kita melihat adanya ketidaksepadanan nilai yang disampaikan dalam sosialisasi politik dan hal itu memicu timbulnya sikap golput.

Selanjutnya calon pemimpin biasanya menyatakan bahwa dirinya layak untuk maju karena merupakan sosok yang secara keseluruhan dinilai baik. Tapi tidak ada penjelasan baik menurut siapa dan apa yang menjadi alat ukur sehingga banyak diantara para calon pemimpin menyatakan dirinya baik untuk dipilih. Di tambah lagi Kelompok pendukung setianya pasti menerapkan *dramaturgical loyalty* untuk menutupi kejelekan dari calon agar kebbaikannya saja yang membubung. Polesan yang begitu indah di bungkus saat kampanye dilakukan dan ketika semuanya itu harus berakhir dengan pernyataan media yang meneriakan kejelekan para calon seperti adanya salah satu calon terkena kasus korupsi, perbedaan janji kampanye dengan kenyataan di lapangan, hal ini juga menjadi alasan dimana masyarakat memilih untuk golput dalam pemilihan karena merasa bosan dengan janji- janji palsu yang diberikan saat kampanye.

Sekali lagi menurut penulis jelaslah bahwa sikap golput belum tentu karena tidak adanya perhatian terhadap dunia politik. Adanya ketidaksepadanan dalam sosialisasi politik dan kekhawatiran akan validitas dari nilai yang disampaikan adalah dua hal yang turut memicu terjadinya golput.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai dengan sampel yang dipilih dari tiga lokasi penelitian yaitu di daerah perkotaan, transisi, dan pedesaan sesuai struktur daerah Kota Binjai. Responden terdiri dari berbagai latar belakang baik dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, dan keikutsertaannya dalam organisasi. Dari survey yang dilakukan terhadap responden ditambah wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber kemudian menghasikan data yang kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

3. Pemahaman masyarakat di Kota Binjai dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tergolong masih rendah, karena hasil survey menunjukkan 61,2% responden kurang berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Calon Walikota dan Calon Walikota pada priode yang lalu. Hal ini diperkuat hasil wawancara mendalam yang sebagian besar kurang berpartisipasi aktif dalam politik terutama dalam Pemilihan Calon Walikota dan Calon Walikota. Dari beberapa bentuk pemahaman politik secara konvensional, diantaranya seperti memperbincangkan/mendiskusikan perihal seputar pemilu, mengikuti kampanye dari pasangan calon, menyumbang dana untuk kampanye calon, menjadi tim sukses salah satu calon, menjadi panitia pemilu, serta memberikan suara bagi salah satu pasangan calon dalam pemilu; bentuk pemahaman yang paling lazim dan paling umum dilakukan masyarakat Kota Binjai adalah memberikan suara kepada salah satu pasangan calon dalam pemilu.

4. Masyarakat Kota Binjai tergolong masyarakat pemilih rasional ha ini merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum, dari hasil wawancara yang mendalam secara umum responden yang memberikan suara, diantaranya mendasarkan pilihannya atas penilaian/pertimbangan tertentu. Penilaian/pertimbangan tersebut meliputi antara lain penampilan (performance), program kerja (platform), dan latar belakang/karakter pribadi. Penilaian yang paling banyak menjadi pertimbangan bagi pemilih adalah latar belakang/karakter pribadi.

## **B. Saran**

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan supaya ada penelitian serupa yang bermaksud menguji statistik di Kota Binjai. Selain itu direkomendasikan juga untuk penelitian tentang sejauh mana pengaruh media massa terhadap partisipasi politik masyarakat dari latar belakang sosiokultural yang berbeda.
2. Pemerintah daerah Kota Binjai hendaklah menerapkan kebijakan yang lebih memihak kepada masyarakat agar masyarakat juga antusias dalam berpartisipasi politik maupun dalam pembangunan daerah.
3. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat karena partisipasi masyarakat juga menentukan kebijakan yang diterapkan kepala daerah maupun wakil rakyat terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ananta, Aris, et. al, *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Asfar, M. “*Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Politik*, Vo. 16, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006
- Azra, Azyumardi, *Dari Harvard hingga Mekah*, Jakarta: Penerbit Republika, 2005.
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arief, *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan, 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 105.
- Donald, Parulian. *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Dwight Y King, *The White Book on the 1992 General Election in Indonesia*, Equinox Publishing, 2010.
- Eep Saefulloh Fatah, “*Partai Semangka, Mangga dan Mentimun*”, dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed, *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: AlvaBet, 1999.
- Firmanzah, *Marketing Politik: Anatara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Gerald Pomper, *Voter's choice : Varieties of American Electoral Behavior*, New York: Dod, Mead Company, 1978.
- Ismanto, et.al, *Pemilu Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik* Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial, 2004.
- Jurdi, Syarifudin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khoirul, Anwar. *Perilaku Partai Politik*, Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

- Kristina S. *Masyarakat Dalam Pemilu: Perspektif Sosial Kapital*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Liddle, William dan Saiful Mujani, “Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik”, Kompas, 1 September 2000.
- Nimmo, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Remadja Rosda Karya, cetakan ke empat.
- Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Pamungkas, Sigit. *Pemilu, Perilaku pemilih, dan Kepartaian*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2010.
- Ramadhan, Muhammad, “*Pandangan dan Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Pada Pemilu 2009*” Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2009.
- Richard G. Niemi dan Herbrt F.Weisberg, *Controversier of Voting Behavior* yang dikutip di dalam komunitas embun pagi.
- Ridwan, Asep. *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004*, Jurnal Demokrasi dan HAM Jakarta : The Habibie Center,2000.
- Rusli, M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Saidi, Zaim, *Ilusi Demokraisi: Kritik dan Otokritik Islam*, Jakarta: Republika, 2007.
- Samuel, P Hunting ton dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT. Rineka Cipta Jakarta 1994.
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, “*Modul: Pemilu untuk Pemula*”, Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, Yogyakarta:Penerbit Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM 2010.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), h.131.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo Persada, 2003.

Tim Eska Media. *Edisi Lengkap UUD 1945*. Jakarta: Eska Media. 2002.

Triwulan, Titik Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.

**Website:**

<http://duniabembi.blogspot.com/2013/09/partisipasi-politik-masyarakat-dalam.html>, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU.

www.wikipedia.com

**Wawancara:**

Muhammad Yusuf, SH, MH selaku Mantan Komisioner KPU Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Abdul Khair, selaku masyarakat Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Agus Salim, selaku Kader Partai Golkar Kota Binjai Tahun 2011, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 07- 06- 2015.

Ali Muda selaku masyarakat Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Eni W, selaku masyarakat Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 22- 06- 2015.

Fitri, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.

Himawan Subagyo, selaku masyarakat Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 28- 06- 2015

Irwan, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Iskandar, selaku masyarakat Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Jamal, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.

Jaya, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Jumardi selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Latifah, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.

Sugiono, selaku Camat di Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 04- 06- 2015.

M. Yazid, selaku masyarakat Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 02- 06- 2015.

Marwan selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Rahma, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 09- 06- 2015.

Rahmat, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Ramdhan selaku masyarakat Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Ramli, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 12- 06- 2015.

Rudi, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.

Rusdi Khalid, selaku Tokoh Masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 03- 06- 2015.

Siti Nur Hidayah, selaku masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 23- 06- 2015

Soleh selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Sri Susilawati, selaku masyarakat Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Sudirman selaku masyarakat Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 08- 06- 2015.

Andi Fakhrozi, selaku Komisioner Panwaslu Kota Binjai Tahun 2011, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 05- 06- 2015.

Supriadi, selaku masyarakat Kota Binjai, wawancara penulis, Binjai, Tanggal 13- 06- 2015.